

**ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA “ANAK TELANTAR”
ATAU “ANAK DITELANTARKAN” SEBAGAI SYARAT
PENGANGKATAN ANAK**

(Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak)

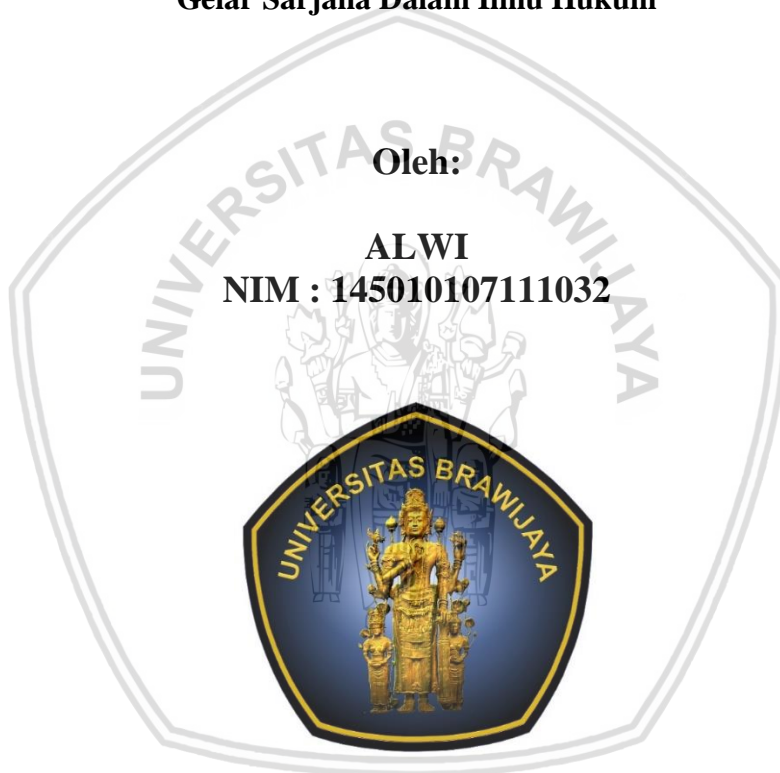
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ALWI

NIM : 145010107111032



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA “ANAK TELANTAR” ATAU
“ANAK DITELANTARKAN” SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN
ANAK**

(Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)

ALWI

NIM : 145010107111032

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 5
September 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratih Dheviana Puru HT., S.H., LLM.

NIP. 19790728 200502 2 001

Fitri Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 2012088507072001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.

NIP. 197206222005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Batasan Frasa “Anak Telantar” atau “Anak Ditelantarkan” Sebagai Syarat Pengangkatan Anak** (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Terima kasih yang sangat mendalam juga Peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun serta dukungan baik materiil maupun moril demi kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua Peneliti (Bapak Sarif Sagaf dan Ibu Alwiah), atas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada Peneliti;
2. Bapak Drs. H. Syahrul Fauji dan Ibu Hj. Nurlaela, S.Kep, M.Kes, selaku orang tua yang mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang kepada saya sehingga saya tetap dalam keadaan sehat untuk menjalani proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
5. Ibu Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
6. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
7. Keluarga Peneliti yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan materiil maupun moril, antara lain yaitu ; Ayu Sersan Mayor Abdul Haris, Abdollah Adni, Zahra Hamed, Muhajir, Muhibbuddin, Fariz Risal, Hannah Zaimah dan Rizki Bahrudin;
8. Saudari Windiansari Ramadhani A.Md, selaku teman hidup selama saya memulai perjuangan studi saya di Kota Malang ini sampai dengan sekarang yang tiada henti-hentinya dalam memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil;
9. Saudara Muh. Fawwaz Kamal, Irfan Rezo bage, Mochammad Adi Vidiensyah, Muhammad Bayu Septian selaku sahabat karib yang

- selalu mengingatkan akan kewajiban dan tanggung jawab saya selama saya kuliah;
10. Bapak Abdul Khair S.Pd, selaku Guru Pembina saya di Bengkel Sastra SMA Negeri 1 Dompu dan Keluarga Bengkel Sastra SMA Negeri 1 Dompu , selaku wadah tempat saya belajar dan membina karakter serta keperibadian diri saya sehingga saya bisa terdidik seperti ini;
 11. Serta seluruh Rekan, Sahabat, dan Saudra serta Pihak-Pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 5 September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Anak Angkat.....	13
B. Kajian Tentang Orang Tua Angkat	17
C. Kajian Tentang Pengangkatan Anak.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
1) Jenis Bahan Hukum	32
2) Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Definisi Konseptual.....	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Batasan Frasa Anak Terlantar	40
B. Batasan Frasa Anak Ditelantarkan	44
C. Analisis Batasan Frasa Anak Terlantar atau Anak Ditelantarkan Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	5
Tabel 1.2.	Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Ditelantarkan Penetapan Nomor:538/Pdt.P/2015/PN.Sby	58
Tabel 1.3.	Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Ditelantarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.....	63
Tabel 1.4.	Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Ditelantarkan Penetapan Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL	68



Daftar Lampiran

Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata

Keputusan Penugasan Dosen Sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Surat Keterangan Deteksi Plagiasi

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby

Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt

Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL



RINGKASAN

ALWI, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA ANAK TELANTAR ATAU ANAK DITELANTARKAN SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN ANAK (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak), Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. ; Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak yang meliputi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Terdapat kekaburan norma dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak tersebut. Kekaburan norma tersebut terletak pada huruf b yaitu mengenai pengertian “anak telantar atau ditelantarkan”, sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak yang hanya bertuliskan cukup jelas. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak tersebut terdapat kata hubung “atau” yang berarti kedua ketentuan tersebut memiliki makna yang sama, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian, persamaan maupun perbedaan dari kedua ketentuan syarat anak angkat dalam huruf b. Masalah yang dirumuskan terkait dengan batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis, teknik analisis tersebut dipergunakan untuk menganalisis kewenangan sebagai bentuk tanggung jawab dari orang tua, unsur kesengajaan/itikad buruk dari orang tua dan batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frasa anak terlantar dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan.

SUMMARY

ALWI, Private Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, July 2018, *JURIDICAL ANALYSIS OF SCOPE OF DEFINITION OF PHRASE "ABANDONED CHILD" OR "A CHILD WHO IS ABANDONED" AS REQUIRED IN CHILD ADOPTION (A study on the Provision of Article 12 Paragraph (1) Letter b of Government Regulation Number 54 of 2007 on Child Adoption Procedures)*, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. ; Fitri Hidayat, S.H., M.H.

The terms of the child to be appointed are regulated in Article 12 paragraph (1) The PP of adoption which is not yet 18 (eighteen) years old, is abandoned or neglected, is in the care of the family or in the care of the child, and requires special protection. There is legal obscurity in the provisions of Article 12 paragraph (1) of the adoption of such Child. The obscurity of the law lies in the letter b that is about the meaning of "abandoned child or abandoned", whereas in the explanation of Article 12 paragraph (1) letter b PP Appointment of Child which only reads quite clearly. In the provisions of Article 12 paragraph (1) sub-paragraph b of the Appointment of the Child there is a word "or" which means the two provisions have the same meaning, but not explained about the meaning, equality or difference of the two provisions of the adopted child's requirement in letter b. The problem formulated is related to either the fraction or the device or in the market at the time of Government Regulation No. 54 of 2007 about Child Adoption Process.

This study uses normative juridical methods, statutory approaches, conceptual approaches and case approaches, then linked to existing problems, and analyzed using grammatical interpretation, and systematic interpretation, the analytical techniques used to analyze the authority as a form of responsibility from parents, element of intent / bad faith from parents and either the framework or whether or not it is declared in the first instance of December 12 Permanent Decree of the Government of the Republic of Indonesia Number 54 of the Year 2007 On The Ownership.

The results of the research indicate that the phrase of child abandoned in Article 12 paragraph (1) PP of adoption can be interpreted as immature human being that is not maintained, unkempt, and or not, and not fulfilled their needs properly, physically, mentally, spiritually and socially due to improper family conditions that cause these children to need service assistance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah, titipan dan karunia yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk senantiasa dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak menjadi dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.¹ Anak merupakan buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Demi pengembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang serta penuh perhatian.² Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah potensi, tunas memiliki peran strategis, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

¹ Lulik Djatikumoro, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.1.

² Koesparmono Irsan, **Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm.63.

³ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

Lahirnya seorang anak yakni karena terbentuknya atau terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam.⁴ Tujuan adanya perkawinan yakni, membentuk suatu keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan diharapkan memberikan dan menambah keharmonisan serta kebahagiaan dalam keluarga baik secara lahir maupun batin. Suatu perkawinan bahkan dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami istri belum memiliki anak. Namun terkadang Tuhan berencana lain, pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, belum juga dikaruniai keturunan yang dapat melengkapi keindahan dan kebahagiaan rumah tangga mereka.⁵

Meningkatnya frekuensi perceraian, poligami serta pengangkatan anak yang dilaksanakan didalam masyarakat mungkin akibat dari perkawinan yang telah berlangsung lama tetapi tidak segera menghasilkan keturunan. Sehingga apabila suatu perkawinan tidak memiliki keturunan, maka tujuan perkawinan tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, apabila didalam suatu perkawinan sudah ada keturunan (anak), sehingga tujuan perkawinan dirasa telah terpenuhi dan proses kelanjutan generasi dapat berjalan.⁶

Melihat fenomena tersebut melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga

⁴Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, **Hukum dan Hukum Islam**, CV Sinar sakti, Bandar lampung, 2007, hlm 129.

⁵Ali Afandi, **Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)**, Bina aksara, Jakarta, 1986, hlm.28.

⁶Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 251.

yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada, nyata dan tumbuh didalam masyarakat. Masyarakat sangat berperan dalam perlindungan anak, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak dan melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Melakukan pengangkatan anak juga harus berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Bahwa untuk merealisasikan ketentuan mengenai pengangkatan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yakni dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), maka ditetapkan peraturan yang lebih spesifik dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak yakni, Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut PP yakni dalam PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak). Pengertian pengangkatan anak yakni terdapat pada pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengangkatan anak ialah suatu tindakan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan wali yang sah, kekuasaan orang tua atau orang lain

⁷Apong Herlina, **Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm.37.

yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan serta membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁸

Pengangkatan anak dilakukan ditujukan kepada orang tua angkat yang benar-benar ingin melindungi segala hak dari anak tersebut dan ingin membiayai segala keperluan anak tersebut serta dikategorikan sebagai orang yang mampu dalam segi apapun.

Pengangkatan anak bukanlah suatu peristiwa yang baru di Indonesia, hal tersebut merupakan peristiwa yang sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Menurut UU Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya bisa dilakukan guna kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Ketentuan tersebut sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung dari orang tuanya.¹⁰ Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, yakni untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat serta untuk

⁸ Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 1 angka 2.

⁹ Indonesia, **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606, pasal 39 ayat 2.

¹⁰ Indonesia, **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606, pasal 39 ayat 3.

kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak.¹¹ Hal tersebut juga tercantum dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan cara mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PP.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Sedangkan syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak yang meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Terdapat kekaburan norma dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak tersebut. Kekaburan norma tersebut terletak pada huruf b yaitu mengenai pengertian “anak telantar atau ditelantarkan”, sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak yang hanya bertuliskan cukup jelas. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak tersebut terdapat kata hubung “atau” yang berarti kedua ketentuan tersebut memiliki makna yang sama, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian, persamaan maupun perbedaan dari kedua ketentuan syarat anak angkat dalam huruf b.

¹¹ Musthofa Sy, **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**, PT. Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2008, hal 42.

¹² Indonesia, **UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak**, Pasal 12.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat alternatif sehingga setiap syarat yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak tersebut tidak harus terpenuhi secara keseluruhan. Sifat alternatif tersebut dapat dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby., dimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan permohonan agar seorang anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO, yang telah diserahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Yayasan Kartini Surabaya karena kedua orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar dan menunjuk Yayasan Kartini yang berkedudukan di Surabaya sebagai pihak yang berwenang untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diberi tanda P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 dari orang tua bernama BAMBANG M dan MARKAI dan kemudian telah diserahkan ke Yayasan Kartini di Surabaya karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut ;

Dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa diantara keempat syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak bukanlah merupakan syarat kumulatif melainkan alternative karena anak yang diangkat tersebut tidak berada dalam asuhan orang tua ataupun keluarganya yang lain. Selain itu terdapat putusan/penetapan pengadilan lain yang menegaskan bahwa syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat alternative yaitu Penetapan Nomor : 04/ Pdt.P / 2012 / PN.Mkt., dimana dalam pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta

hukum bahwa telah terjadi pengangkatan anak pada tanggal 30 Juli 2010 yang dilakukan oleh suami-istri MOHAMAD IKSAN dan ALVIN VIKASUWARNI terhadap seorang anak perempuan bernama SITI AISYAH di lahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010 penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo.

Kekaburan frasa “anak terlantar” dan “anak ditelantarkan” tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga tujuan dari dibentuknya PP Pengangkatan anak dapat terpenuhi. Kekaburan hukum frasa “anak terlantar” dan “anak ditelantarkan” tersebutlah yang mendasari Peneliti untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul **Analisis Yuridis Batasan Frasa “Anak Telantar atau Anak Ditelantarkan Sebagai Syarat Pengangkatan Anak** (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Urgensi dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait syarat anak yang akan diangkat dan mengenai pengertian anak terlantar dalam PP Pengangkatan Anak.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Mei 2017	Dessy Ratna Wandari, Fakultas Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum	Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak	Apa dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pengangkatan anak	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas

		Universitas Brawijaya.	Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pemngangkat an Anak	pada penetapan No. 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi terkait penetapan status orang tua angkat yang tidak sesuai dengan syarat batas usia dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkat an anak?	tentang pengangkat an anak. Pembedanya dari penelitian ini adalah membahas batasan frasa anak telantar atau ditelantarkan sebagai syarat pengangkat an anak dengan tujuan untuk memberikan pengertian terkait frasa tersebut.
2.	Mei 2017	Siti Putri Hawa, Fakultas Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.	Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat	Bagaimana pembatasan alasan pembatalan pengangkat an anak demi terwujudnya perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut?	Persamaan dengan penelitian ini adalah mengangkat terkait batasan tertentu terhadap pelaksanaan pengangkat an anak. Sedangkan untuk pembedanya dengan penelitian ini adalah membahas batasan frasa anak

					telantar atau ditelantarkan sebagai syarat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memberikan pengertian terkait frasa tersebut.
--	--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis jabarkan diatas maka Penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu apa batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta menambah kontribusi pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai pengangkatan anak dengan pokok bahasan mengenai batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memberikan penetapan maupun putusan dalam lingkup pengangkatan anak khususnya mengenai batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Bagi Calon Orang Tua Angkat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru bagi calon orang tua angkat dalam memahami batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

E. Sistematika Penelitian

Sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Batasan Frasa Anak Telantar Atau Anak Ditelantarkan Sebagai Syarat Pengangkatan Anak (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak). Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

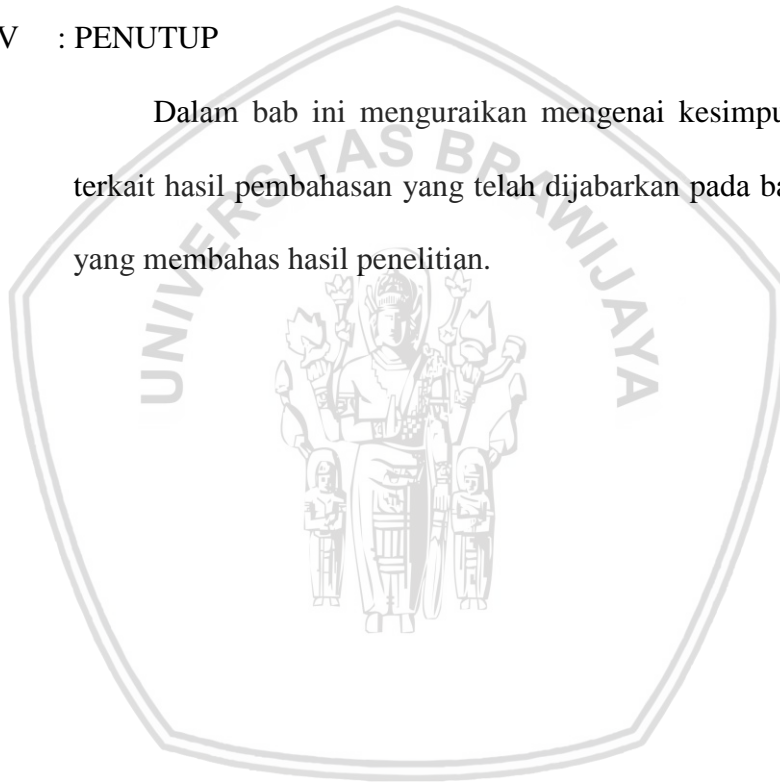
Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu batasan frasa anak telantar atau anak ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak

Definisi anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah seorang keturunan sebagai penerus keluarga kelak nantinya yang mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya.¹³ Pengertian anak sangatlah beragam apabila dilihat dari berbagai sudut pandang.

1) Apabila dilihat dari sudut pandang hukum pengertian anak yakni sebagai berikut :

1. Menurut pasal 330 KUH Perdata, “Anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.”¹⁴
2. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”¹⁵

¹³Hamzah Ahmad dan Santoso Ananda, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 2006, hlm.21.

¹⁴Indonesia, **Kitab UU Hukum Perdata**, Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c, yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama dan Kedua Kitab UU Hukum Perdata).

¹⁵Indonesia, **UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, pasal 1 ayat 1.

3. Menurut pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak adalah anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kewenangan orang tuanya selama tidak dicabut dari kewenangannya.”¹⁶
 4. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan termasuk pula anak yang masih ada dalam kandungan.”¹⁷
 5. Menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, “Anak ialah bagian dari penerus cita-cita perjuangan bangsa, generasi muda serta sumber daya manusia guna pembangunan nasional.”¹⁸
- 2) Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi pengertian anak yakni sebagai berikut:
- Melihat dari sudut pandang ekonomi, “Anak merupakan kelompok yang tidak atau belum produktif karena mereka baru bisa melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif dan belum bisa melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif.”¹⁹

¹⁶ Indonesia, **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019, pasal 47 ayat (1).

¹⁷ Indonesia, **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606, pasal 1 angka 1.

¹⁸ Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768.

¹⁹ J. Satrio, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga**, Sumur, Bandung, Bandung, 2000, hlm. 36.

- 3) Apabila dilihat dari sudut pandang agama pengertian anak yakni sebagai berikut:

Menurut sudut pandang agama Islam, dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”²⁰

2. Pengertian Anak Angkat

Arti dari anak angkat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah anak orang lain yang diambil (diangkat) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²¹ Selanjutnya pendapat menurut Fuad Muhammad Fachruddin tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa :

“Anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.”²²

Menurut Hilman Hadikusuma, definisi anak angkat yakni :

“Anak angkat ialah anak orang lain yang diakui anak sendiri oleh orang tua angkat secara resmi berdasarkan hukum adat setempat yang bertujuan untuk keberlangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”²³

²⁰Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001, hlm. 50.

²¹Hamzah Ahmad dan Santoso Ananda, *Op.Cit*, hlm.21.

²²Fuad Muhammad Fachruddin, **Masalah Anak dalam Hukum Islam**, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm.41.

²³Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat Cetakan I**, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 150.

Menurut pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak angkat ialah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kewenangan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya atau diantara salah satu orang tuanya tidak sanggup menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”²⁴

Menurut pasal 1 angka 1 PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak:

“Anak angkat ialah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kewenangan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya menurut keputusan atau penetapan pengadilan.”²⁵

Sedangkan pengertian anak angkat menurut hukum adat adalah “Anak orang lain yang dijadikan anak secara lahir dan batin dan diperlakukan seakan-akan anak tersebut adalah anak kandung sendiri karena adanya rasa kecintaan atau kesayangan”.²⁶ Seorang anak yang sudah diangkat menjadi anak angkat, maka ia diterima dan berkedudukan dalam posisi yang sama baik biologis maupun sosial layaknya anak kandung walaupun sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.²⁷

²⁴Indonesia, **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606, pasal 1 angka 9.

²⁵Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 1 angka 1.

²⁶Tamakiran, **Asas-asas Hukum Waris**, Puionir Java, Bandung, 1972, hlm. 52.

²⁷Kamil A dan Fauzan H.M, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35.

3. Syarat- Syarat Calon Anak Angkat

Ketentuan dalam hal calon anak yang akan diangkat juga sudah diatur jelas, sehingga tidak semua anak bisa dijadikan sebagai anak angkat. Dalam hal tersebut terdapat kriteria calon anak yang akan diangkat yakni diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang menyebutkan bahwa :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan;
- c. Terletak dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. anak belum berumur 6 (enam) tahun, merupakan kepentingan utama;
- b. anak berumur 6 (enam) tahun sampai dengan belum berumur 12 (dua belas) tahun, selama terdapat alasan yang mendesak; dan
- c. anak berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, selama anak membutuhkan perlindungan khusus.²⁸

B. Kajian tentang Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua ialah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun lazimnya di masyarakat definisi orang tua itu ialah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini yaitu ibu dan bapak juga yang mengurus dan yang telah

²⁸Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2.

membina anaknya dengan cara memberikan teladan yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, disamping itu orang tua juga menginformasikan anaknya ke dalam hal-hal yang ada di dunia ini dan menjawab secara rinci tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh anak, maka pengetahuan pertama yang didapatkan oleh anak yaitu dari orang tuanya karena orang tua merupakan titik kehidupan rohani si anak dan sebagai pemicu berkenalnya dengan alam luar, maka tiap-tiap reaksi emosi anak dan pemikirannya di akan datang berpengaruh pada sikapnya terhadap orang tua yaitu ibu dan bapak yang memegang peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.

Kata orang tua yakni kalimat majemuk, yang secara leksikal yang artinya “Ayah ibu kandung orang yang dirasa tua (pandai, ahli, cerdas dan sebagainya), orang-orang yang disegani (dihormati).²⁹ Istilah orang tua menurut pasal 1 angka 3 PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yakni :

“Orang tua adalah ayah dan/ ibu kandung, atau ayah dan/ ibu tiri, atau ayah dan/ ibu angkat.”³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

²⁹Anton Moeliono, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 629.

³⁰Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 1 angka 3.

Menurut pengertian etimologi, definisi orang tua yang dimaksud pada pembahasan ini yakni seseorang yang sudah melahirkan dan memiliki tanggung jawab kepada anak-anak baik anak sendiri maupun anak yang didapat dengan cara adopsi,³¹ orang tua karena adopsi dimaksudkan yaitu dalam kategori “Orang tua” yang sesungguhnya karena dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, orang tua karena adopsi memiliki tanggung jawab yang sejajar dengan orang tua yang sesungguhnya, dalam beragam hal yang mencakup seluruh indikator kehidupan baik lahiriah ataupun batiniah, orang tua dalam hal ini yakni suami istri, merupakan figur utama dalam suatu keluarga, tidak ada orang yang lebih penting bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, terlebih bagi adat ketimuran, orang tua merupakan lambang utama kehormatan, maka orang tua untuk para anak merupakan tumpuan segalanya.

2. Pengertian Orang Tua Angkat

Definisi orang tua angkat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah laki-laki dan perempuan yang menjadi ayah dan ibu seseorang (bukan anak sendiri) berdasarkan adat atau hukum yang berlaku.³² Selanjutnya istilah orang tua angkat menurut pasal 1 angka 4 PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yakni :

“Orang tua angkat ialah orang yang diberikan kewenangan untuk mendidik, merawat dan membesarkan anak berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan.”³³

³¹Jalaludin Rahmad, **Islami Alternatif Ceramah-Ceramah Dikampus**, Mizan, Bandung 1993, hlm. 121.

³²Ahmad hamzah dan Santoso Ananda, *op.cit*, hlm.268.

³³Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 1 angka 4.

Menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pengertian calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

“Calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat.”³⁴

Pengangkatan anak ini yang menyebabkan lahirnya hubungan hukum diantara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti ikatan diantara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris, kewajiban memberi nafkah. Hubungan yang lahir karena pengangkatan anak itu tidak semata-mata hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.³⁵

3. Syarat-Syarat Calon Orang Tua Angkat

Calon orang tua angkat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

³⁴Indonesia, **Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak**, pasal 1 ayat (4).

³⁵ Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm. 81.

- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berperilaku baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan dan kesejahteraan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. sudah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. dan mendapat izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.³⁶

C. Kajian tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Dilihat segi etimologi, kata pengangkatan anak bersumber dari bahasa Belanda "*Adoptie*" atau "*adoption*" (bahasa Inggris) yang memiliki arti pengangkatan anak, mengangkat anak. Definisi dalam bahasa Belanda berdasarkan kamus hukum, berarti mengangkat seorang anak untuk menjadikannya sebagai anak kandung sendiri, sehingga tidak ada perbedaan status anak dari anak hasil pengangkatan anak dengan anak kandung sendiri.³⁷

Menurut Soepomo, "Pengangkatan anak ialah perbuatan mengangkat anak orang lain sehingga muncul hubungan hukum diantara orang tua angkat dengan

³⁶Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 13.

³⁷Rachmat Trijono, **Kamus Hukum**, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.285

anak angkat seperti halnya hubungan orang tua kandung dengan anak kandung.”³⁸

Menurut Arif Gosita, “Pengangkatan anak ialah suatu perbuatan meminta anak dari orang lain untuk dipelihara, diperlakukan seperti anaknya sendiri, berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama-sama dan sah berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”³⁹ Menurut pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

“Pengangkatan anak ialah suatu tindakan hukum yang mana mengalihkan seorang anak dari lingkungan kewenangan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁴⁰

Berdasarkan beberapa definisi diatas bahwa pengangkatan anak pada intinya adalah mengambil anak dari orang lain yang diperlakukan atau dianggap seperti anak sendiri. Fenomena tersebut memang banyak sekali terjadi di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang alasan dan tujuan dilakukannya pelaksanaan pengangkatan seorang anak.

2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional

Pengangkatan anak berdasarkan hukum nasional adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan proses hukum dan ketentuan hukum yang

³⁸R. Soepomo, **Bab-bab tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 15.

³⁹Gosita Aris, **Masalah Perlindungan Anak**, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44.

⁴⁰Indonesia, **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768, pasal 1 angka 1.

berlaku, yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa dalam pengangkatan anak terdapat pengalihan seorang anak dari kewenangan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban diantara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut harus sama dengan kewajiban dan hak antara anak kandung dengan orang tua kandung. Hukum Nasional memandang bahwa pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan hanya sekedar diperlukan untuk member kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.⁴¹

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Masalah pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum Nasional. Dalam Al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai mazhab dan menjadi salah satu sumber hukum

⁴¹<http://digilib.uinsby.ac.id>, Diakses Tanggal 11 Mei 2018.

di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian harta orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah, yang mana dimuat dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak memperoleh wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan anak angkatnya.
- 2) Bagi anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orangtua angkatnya.⁴²

Berdasarkan bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan. Pengangkatan anak dalam hukum Islam dapat dibenarkan asal tidak melanggar ketentuan sebagai berikut:⁴³

1. Tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya;
2. Anak angkat hanya mewaris dari orang tua kandungnya;

⁴²Indonesia, **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, pasal 209.

⁴³Muderis Zaini, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 54.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung terkecuali hanya sebagai tanda pengenal atau alamat saja.
4. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan untuk anak angkatnya.

Dengan adanya ketentuan di atas diketahui bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan anak saja dengan tujuan agar anak tersebut tidak menderita atau terlantar dalam tumbuh kembangnya. Pada intinya menurut Islam pengangkatan anak adalah bentuk solidaritas keimanan antar umat yaitu saling membantu umat manusia dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.

4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di setiap negara, termasuk Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, hal tersebut semua sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak dari luar ke dalam kekerabatan yang kemudian diakui anak sendiri oleh orang tua angkat sehingga terjalin suatu ikatan layaknya anak kandung dan orang tua kandung serta diakui oleh hukum adat setempat. Dalam buku Muhammad Budiarta yang berjudul *Pengangkatan*

Anak Ditinjau dari Segi Hukum, menyebutkan motivasi orang tua melakukan pengangkatan anak yaitu:⁴⁴

1. Harapan mempunyai anak, untuk pasangan yang tidak memiliki anak.
2. Keinginan dan kepercayaan akan mendapatkan anak sesudah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
3. Ingin menambah anak yang lain jenis kelamin dari anak yang telah dimiliki.
4. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, yatim piatu, miskin dan sebagainya.
5. Adanya saudara dari orang tua kandung anak angkat yang tidak memiliki anak, maka diambil oleh orang tua kandung anak angkat tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkatnya.”

Dilihat dari motivasi-motivasi pengangkatan anak secara hukum adat diatas memang berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang lebih menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi untuk kepentingan terbaik untuk anak yang akan diangkat. Berbeda halnya dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak punya anak) mengambil/mupon anak dari lingkup kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan dengan cara kekerabatan, maka anak angkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan sebagai anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya serta terlepas dari golongan sanak saudaranya yang dahulu.⁴⁵

Menurut hukum adat, akibat dari pengangkatan anak mengaitkan antara hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya dan juga hak

⁴⁴Muhammad Budhiarta, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, PT. Melton Putra, Jakarta, 1991, hlm. 20.

⁴⁵Kamil A dan Fauzan H.M, *Op.cit*, hlm. 34.

dan kewajiban anak tersebut dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan misalnya akibat hukum diantara anak angkat dan orang tua kandung. Akibat hukum diantara anak angkat dan orang tua kandung adalah terputusnya ikatan diantara anak angkat dengan orang tua kandungnya karena dalam hukum adat mengisyaratkan adanya imbalan sebagai pengganti pada orang tua kandung dari anak angkat.⁴⁶ Sedangkan dengan orang tua angkat, kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung. Anak angkat berhak mewaris layaknya anak kandung dalam hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya.

Menurut Bushar Muhammad, tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat bersifat terang dan tunai. Terang artinya harus dilaksanakan dengan upacara adat serta dibantu oleh Kepala Adat, dilakukan didepan orang banyak dengan resmi secara formal sehingga setiap orang dianggap sudah mengerti. Tunai artinya, perbuatan pengangkatan anak itu selesai pada saat itu juga dan tidak mungkin untuk ditarik kembali.⁴⁷ Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat maka dia berkedudukan sama dan diterima secara biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak itu.

5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam prakteknya telah menjadi bagian dari budaya yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat dari penetapan yang diberikan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama

⁴⁶Kamil A dan Fauzan H,M, *Loc.cit*, hlm. 35.

⁴⁷Muhammad Bushar, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981, hlm. 29.

dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk pula perkara dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak. Dasar hukum dalam pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari berbagai macam peraturan dimana yang menjadi rujukan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak, misalnya:

- 1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Misalnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa dalam pengangkatan anak, calon anak angkat yang akan diangkat harus belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada di dalam pengasuhan keluarga atau dalam asuhan lembaga pengasuhan anak, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu syarat untuk calon orang tua angkat adalah berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu.⁴⁸ Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁹

Penelitian yuridis normatif ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, mencari teori dan pendapat hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta mencari penetapan ataupun putusan yang terkait, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan hukum yang sesuai dengan batasan frasa

⁴⁸Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, PT Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23.

anak telantar atau ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian berjudul Batasan Frasa Anak Telantar Atau Ditelantarkan Sebagai Syarat Pengangkatan Anak (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak) pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Kemudian yang kedua, selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁰ Pendekatan ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

⁵⁰*Ibid*, hlm 94.

Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sehingga peneliti dapat mempergunakan konsep tersebut sebagai dasar untuk mengkaji makna anak terlantar dan ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketiga peneliti juga menggunakan pula pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah atau memperbandingkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yang dalam pembahasan ini bisa berupa penetapan juga). Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan/penetapan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵¹

⁵¹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, Diakses Tanggal 11 Mei 2018.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer⁵² adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁵³ Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum yang akan dikaji itu sendiri, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt;

⁵²Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media, 2008, hlm.392. Merupakan bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian terdiri dari aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Aturan lain di bawah undang-undang hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada.

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 29.

5. Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor:
0461/Pdt.P/2012/PA.BL.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, seminar, majalah, terbitan pemerintah, serta bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku-buku pembelajaran, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum yang terkait dengan makna anak terlantar dan ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta hasil wawancara dengan Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah

Surat Kabar, Internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁵⁴

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh dari:

1. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;
4. Penelusuran Pustaka Pribadi;
5. Wawancara dengan Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. dan Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
6. Penelusuran di situs-situs internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Batasan Frasa Anak Telantar Atau Ditelantarkan Sebagai Syarat Pengangkatan Anak (Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b

⁵⁴ <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Tanggal 29 November 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui penetapan /putusan pengadilan terkait pengangkatan anak dan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang terkait dengan penelitian ini.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online;
3. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentua peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut

bahasa sehari-hari yang umum.⁵⁵ Interpretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan acuan bahasa yang dipergunakan sehari-hari.

Penafsiran Gramatikal ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menafsirkan ketentuan terkait makna anak terlantar dan ditelantarkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. dengan berpedoman kepada arti kata menurut tata bahasa yang tumbuh berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁵⁶ Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang-undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Penafsiran sistematis ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak dengan meninjau ketentuan dari pasal lain

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 14.

⁵⁶*Ibid*, hlm 16.

yang juga terdapat dalam PP Pengangkatan Anak atau dengan ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

F. Definisi Konseptual

- a. Batasan dalam konteks penelitian ini adalah pengelompokan atau identifikasi terkait anak yang dapat dikatakan sebagai anak telantar atau ditelantarkan agar bisa dilakukan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan; dan
- c. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak supaya dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi anak dan harus sesuai dengan asas-asas perlindungan anak serta ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam PP Pengangkatan anak. Ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak khususnya calon anak angkat diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan anak antara lain belum (a) berusia 18 (delapan belas) tahun, (b) merupakan anak telantar atau ditelantarkan, (c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan (d) memerlukan perlindungan khusus. Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas mengenai syarat pengangkatan anak dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan anak tersebut khususnya dalam huruf b yaitu merupakan anak telantar atau ditelantarkan. Ketentuan tersebut menurut Peneliti mengalami kekaburan hukum, karena tidak terdapat pengertian dan tolak ukur yang jelas mengenai frasa anak terlantar atau ditelantarkan yang dapat menyebabkan terjadinya multi tafsir pada saat menerapkannya dalam suatu permasalahan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan anak tersebut memiliki 2 (dua) syarat yang berbeda yang dihubungkan dalam satu kalimat dengan menggunakan kata hubung “atau.” Kata hubung atau tersebut mengakibatkan kedua syarat itu bersifat *alternatif* sehingga syarat-syarat tersebut tidaklah harus terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi dapat dijalankan apabila salah satu syarat telah terpenuhi. Dengan kata lain dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut, para pihak diperbolehkan untuk memilih

salah satu dari kedua syarat tersebut. Menurut Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa kata hubung atau dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menandakan bahwa ketentuan tersebut bersifat pilihan yaitu memilih salah satu dari dua syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki akibat hukum yang sama apabila dipenuhi keduanya ataupun hanya salah satu ketentuan saja yang terpenuhi.

Terkait dengan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, menurut Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UUPPP), dalam hal redaksional peraturan perundang-undangan diatur dalam lampiran kedua UUPPP yang pada intinya mengatur bahwa redaksional dalam peraturan perundang-undangan baik dari tingkat teratas sampai tingkat yang paling bawah haruslah sesuai dengan EYD (Ejaan Yang telah Disempurnakan). Menurut EYD penggunaan kata “atau” dipergunakan untuk menunjukkan kalimat yang bersifat pilihan (*alternatif*) sedangkan kata “dan” dipergunakan untuk menggabungkan sebuah kalimat menjadi satu (*kumulatif*) sedangkan untuk tanda (/) dipergunakan untuk menunjukkan kata “dan/atau” sehingga kalimat yang menggunakan kata (/) dapat bersifat menggabungkan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 14.00 WIB.

(*kumulatif*) maupun pilihan (*alternatif*) sehingga apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hanya bersifat pilihan (*alternatif*) cukup menggunakan kata “atau” sebagai kata hubung dalam kedua kalimat tersebut, tidak perlu menggunakan tanda (/) karena penggunaan tanda (/) hanya akan menghasilkan kalimat dengan makna yang berbeda.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa syarat pengangkatan anak yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan anak yang berbunyi ”merupakan anak telantar atau ditelantarkan” tersebut tidak harus terpenuhi keduanya, hanya salah satu dari syarat tersebut terpenuhi dapat dikatakan bahwa kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua syarat tersebut adalah telah terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan anak, baik apabila kedua syarat tersebut terpenuhi ataupun hanya salah satu akan tetap menimbulkan akibat hukum yang sama.

A. Batasan Frasa Anak Telantar

1. Batasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “anak telantar adalah Anak yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Reka Dewantara, SH., MH., yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”⁵⁹ Dengan demikian pengkategorian anak sebagai anak telantar adalah berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dari anak.

2. Batasan Menurut Para Ahli

Anak telantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.⁶⁰

Anak telantar diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orang tua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orang tua, atau karena kesibukan orang tua dalam mengejar karir.⁶¹

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI) diartikan sebagai manusia yang belum dewasa. Sedangkan telantar menurut KBBI diartikan sebagai tidak terpelihara, tidak terawat,

⁵⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰ Walter A Friedlander, *Introduction to Social Welfare*, Prentice Hall, India, 1982, hlm. 45.

⁶¹ Howard Dubowitz, *Handbook for Child Protection Practice*, Sage, California, 2000, hlm. 10.

dan/atau tidak terurus. Kata anak telantar terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu anak dan telantar, dengan demikian kata anak telantar dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus.

Melihat uraian mengenai pengertian frasa anak telantar sebagai salah satu syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak sebagaimana telah Peneliti dijelaskan diatas, baik pengertian menurut peraturan perundang-undangan, menurut para ahli, dan menurut KBBI, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur penting dalam mengklasifikasikan seorang anak menjadi anak telantar. Klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manusia yang belum dewasa. Menurut Pasal 47 UU Perkawinan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, begitu pula dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, artinya belum dewasa berarti belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus. Anak dapat dikatakan tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus adalah apabila kedua orang tua atau pihak lain yang berkedudukan sebagai wali anak tidak memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sesuai ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan;

3. Tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kebutuhan anak menurut Pasal 62 UU Perlindungan anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Serta pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial; dan
4. Kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya. Keadaan tersebut menyebabkan orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) diatas.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, frasa anak telantar dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan karena kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan.

B. Batasan Frasa Anak Ditelantarkan

Pengertian mengenai frasa anak ditelantarkan belum diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam definisi para ahli baik secara eksplisit maupun secara implisit sebagaimana pengertian mengenai frasa anak telantar yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, Peneliti dalam melakukan pembatasan terhadap frasa anak ditelantarkan berikut ini akan mendefinisikan pengertian anak ditelantar dari segi Bahasa Indonesia kemudian dikaitkan dengan pengertian anak ditelantar menurut peraturan perundang-undangan, menurut para ahli, dan menurut KBBI.

Frasa ditelantarkan merupakan gabungan dari kata terlantar dengan diberi awalan di dan akhiran kan. Menurut EYD awalan “di” dan akhiran “kan” terhadap suatu kata dapat diartikan sebagai bentuk pasif dari kata yang memiliki imbuhan “me” dan akhiran “kan”. Imbuhan “me” dan akhiran “kan” sendiri digunakan untuk membuat suatu kata sebagai kata kerja. Menelantarkan menurut KBBI diartikan sebagai membuat terlantar, sehingga awalan “di” dan akhiran “kan” dalam frasa ditelantarkan merupakan bentuk pasif dari membuat terlantar. Berikut ini merupakan pengertian frasa anak ditelantarkan dikaitkan dengan pengertian anak telantar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik

fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”⁶² Frasa telantar menurut pengertian ini apabila diberi awalan “me” dan akhiran “kan” akan memiliki arti “membuat anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.” Sehingga pengertian ditelantarkan adalah bentuk pasif dari pengertian frasa menelantarkan tersebut.

2. Menurut Para Ahli

Anak telantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.⁶³

Pengertian anak telantar menurut para ahli sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat juga diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orang tua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orangtua, atau karena kesibukan orang tua dalam mengejar karir.

⁶² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Walter A Friedlander, *Op.cit.*

Frasa telantar menurut pengertian ini apabila diberi awalan “me” dan akhiran “kan” akan memiliki arti “membuat anak tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya yang disebabkan karena orang tua melalihkan tanggung jawabnya.” Pengertian ditelantarkan dalam hal ini merupakan bentuk pasif dari pengertian frasa menelantarkan tersebut.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Anak telantar dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus. Frasa telantar menurut pengertian ini apabila diberi imbuhan awalan “me” dan akhiran “kan” akan memiliki arti “membuat manusia yang belum dewasa tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus.” Dengan demikian, pengertian ditelantarkan merupakan bentuk pasif dari pengertian frasa tersebut.⁶⁴

Bentuk pasif dari frasa telantar yang diberi imbuhan awalan “me” dan akhiran “kan” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya membuat sebuah kalimat yang mengandung frasa tersebut mengalami pergeseran tempat untuk subjek dan

⁶⁴ Ekarasi, **Jenis-Jenis Imbuhan-Fungsi dan Maknanya dalam Bahasa Indonesia** (online), <https://dosenbahasa.com/jenis-jenis-imbuhan>, diakses Pada Tanggal 11 September 2018 (Pukul 11.25 WIB).

objeknya. Sebagai contoh adalah kalimat orang tua menelantarkan anaknya memiliki bentuk pasif yaitu anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Kalimat orang tua menelantarkan anaknya dalam hal ini memiliki pengertian bahwa orang tua membuat anaknya telantar, sedangkan kalimat anak ditelantarkan orang tuanya dalam hal ini memiliki arti bahwa anak mengalami penelantaran dari orang tuanya. Kedua kalimat tersebut tetap memiliki pengertian yang sama satu dengan yang lainnya, namun mengalami pergeseran tempat untuk subjek dan objeknya, dimana untuk kalimat yang pertama orang tua sebagai subjek berada diawal kalimat dan anak sebagai objek berada di ahir kalimat sebaliknya dalam kalimat kedua orang tua sebagai subjek berada diakhir kalimat dan anak sebagai objek berada di awal kalimat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, frasa anak ditelantarkan dapat diartikan sebagai “membuat manusia yang belum dewasa tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan karena orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak maupun dikarenakan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan.” Dalam hal ini yang bertindak sebagai subjek untuk membuat anak terlantar adalah orang tua dan pihak-pihak lain yang sebelumnya telah ditetapkan bertindak sebagai wali dari anak tersebut.

Menurut analisis yang dilakukan oleh Peneliti, frasa anak telantar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terjadi dengan tanpa adanya kesengajaan dari orang tua maupun wali dari anak tersebut. Berbeda dengan itu,

frasa anak ditelantarkan terjadi secara lebih disengaja oleh orang tua maupun walinya. Sebagai contoh anak telantar dapat terjadi akibat orang tua atau wali dari anak meninggal dunia akibat bencana alam yang mengakibatkan anak menjadi anak telantar, sedangkan contoh anak ditelantarkan adalah anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya.

Pengangkatan anak merupakan pengalihan seorang anak dari kewenangan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban diantara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut harus sama dengan kewajiban dan hak antara anak kandung dengan orang tua kandung. Hukum Nasional memandang bahwa pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan hanya sekedar diperlukan untuk member kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.⁶⁵

Pengangkatan anak dalam prakteknya telah menjadi bagian dari budaya yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat dari penetapan yang diberikan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas

⁶⁵ Digilib UINSby, *Op.cit*, diakses Tanggal 11 Mei 2018 jam 18.33 WIB.

kekuasaan kehakiman bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk pula perkara dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak. Dasar hukum dalam pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari berbagai macam peraturan dimana yang menjadi rujukan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak tersebut, dalam salah satu peraturannya terdapat ketentuan mengenai calon anak yang akan diangkat, sehingga telah terdapat ketentuan yang jelas mengenai calon anak angkat yang menyebabkan tidak semua anak bisa dijadikan sebagai anak angkat. Kriteria calon anak yang akan diangkat tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

d. Memerlukan perlindungan khusus.

Selain ketentuan mengenai kriteria anak yang akan diangkat yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai usia anak angkat. Usia anak angkat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi anak belum berumur 6 (enam) tahun, merupakan kepentingan utama, anak berumur 6 (enam) tahun sampai dengan belum berumur 12 (dua belas) tahun (artinya genap 6 (enam) tahun sampai 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari), selama terdapat alasan yang mendesak, dan anak berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berumur 18 (delapan belas) tahun (artinya genap 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari), selama anak membutuhkan perlindungan khusus.⁶⁶ Dengan demikian dapat kita lihat bahwa usia anak yang akan diangkat sebagai anak angkat terbatas hanya dalam rentan baru lahir sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun (yang diutamakan/prioritas), anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun harus memiliki alasan tertentu yang mendesak, sedangkan pengangkatan anak terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) harus memenuhi persyaratan tertentu.

Syarat yang lain adalah merupakan anak telantar atau ditelantarkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa frasa anak telantar memiliki arti manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual

⁶⁶ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

maupun sosial disebabkan karena orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak maupun dikarenakan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan. Sedangkan frasa anak ditelantarkan memiliki arti membuat manusia yang belum dewasa tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan karena orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak maupun dikarenakan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan. Pemenuhan syarat anak angkat dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan anak tersebut termasuk diantaranya adalah “merupakan anak telantar dan ditelantarkan” yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak sebagaimana telah dijelaskan diatas, ditetapkan oleh Hakim berdasarkan dasar pertimbangannya dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan-keterangan yang terdapat di persidangan acara perdata. Terpenuhi atau tidaknya syarat calon anak angkat tersebut dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan anak menurut peraturan-peraturan yang berlaku dan dituangkan oleh Hakim dalam penetapan/putusan pengangkatan anak.

C. Analisis Batasan Frasa Anak Telantar atau Anak Ditelantarkan Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan

Frasa anak telantar dan anak ditelantarkan secara umum memiliki unsur-unsur yang sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan hanya terdapat dalam pola

kata dimana anak telantar merupakan kata yang menunjukkan anak yang telantar sedangkan anak ditelantarkan merupakan pola kata yang merupakan bentuk negatif dari kata yang menunjukkan bahwa anak tersebut sengaja ditelantarkan oleh orang tua maupun pihak lain yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut. Unsur-unsur anak terlantar dan ditelantarkan antara lain sebagai berikut:

1. Manusia yang belum dewasa. Menurut Pasal 47 UU Perkawinan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, begitu pula dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, artinya belum dewasa berarti belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus. Anak dapat dikatakan tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus adalah apabila kedua orang tua atau pihak lain yang berkedudukan sebagai wali anak tidak memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sesuai ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan;
3. Tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kebutuhan anak menurut Pasal 62 UU Perlindungan anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Serta

pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial; dan

4. Kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya. Keadaan tersebut menyebabkan orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) diatas.

1. Analisis Penetapan Nomor : 538/Pdt.P/2015/PN.Sby.

a. Para Pihak

YAYASAN KARTINI SURABAYA , berkedudukan di Surabaya dan berkantor di jalan Siak No.2 Surabaya yang dala hal ini diwakili oleh ENDANG TRIKARDININGSIH beralamat di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan X/M-1 Surabaya selaku pimpinan Yayasan tersebut diatas , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Anak yang dimohonkan dalam perkara penetapan ini adalah seorang anak laki-laki bernama Rizky Dewantaoro yang lahir di Surabaya tanggal 6 Mei 1998 (Bukti P-1) diluar nikah dari seorang perempuan indonesia bernama Ibu Markati, beragama Islam, bertempat tinggal di Endroso V/9 Surabaya. Ibu kandung anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut, ditinggal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya maka dengan surat Penyerahan anak tertanggal / Tahun

1998 anak tersebut oleh RSUD Dr. Soetomo diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Kartini Surabaya dengan melepaskan segala hak dan kewajiban atas anak tersebut. Kemudian RSUD Dr. Soetomo memberi kuasa penuh kepada Yayasan Kartini Surabaya untuk mencari orang tua angkat bagi anak tersebut dan melakukan semua tindakan yang perlu tanpa kecuali bagi pengangkatan anak tersebut.

Anak tersebut sampai sekarang belum memperoleh calon orang tua angkat yang bermaksud mengambil anak tersebut, dan sebagaimana persyaratan adopsi sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Thn 2009 bahwa anak harus memiliki Akte Kelahiran. Sebagai salah satu persyaratan untuk dapatnya anak menempuh pendidikan formal di Sekolah umum bagi anak tersebut diperlukan adanya akte kelahiran, padahal anak tersebut belum pernah memiliki akte kelahiran. Untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut Yayasan Kartini Surabaya sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, namun mendapat penolakan karena anak tersebut tidak memiliki kelengkapan identitas kependudukan orang tuanya.

Sebagai jalan keluar untuk pengurusan memperoleh akte lahir bagi anak tersebut pihak kantor catatan Sipil menyarankan pemohon agar ke pengadilan Negeri Surabaya untuk mohon agar anak tersebut terlebih dahulu ditetapkan sebagai anak telantar, untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam pengadilan bahwa sejak anak itu diserahkan kepada Yayasan kartini Surabaya, ibu kandung dari anak tersebut belum

pernah datang untuk menjenguk. Pendaftaran bagi anak terlantar dapat diterima dan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan pasal 57 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menyatakan dalam hak anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan sebagaimana anak terlantar. Dalam permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan permohonan agar seorang anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO , yang telah diserahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Yayasan Kartini Surabaya karena kedua orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar dan menunjuk Yayasan Kartini yang berkedudukan di Surabaya sebagai pihak yang berwenang untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan baik.

Untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda dan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama RUHIJATI dan TRI KARDIANA. Dari keterangan saksi RUHIJATI dan TRI KARDIANA, dan surat bukti yaitu Akte Notaris/PPAT WIDIO RAHARDJO, SH tertanggal 02 Juni 2008 Nomer : 1 bahwa Pemohon adalah Ketua Yayasan Kartini yang berkedudukan di Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya,

sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Sebagaimana alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah meernyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 dari orang tua bernama BAMBANG M dan MARKAI dan kemudian telah diserahkan ke Yayasan Kartini di Surabaya karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut. Berdasarkan alat bukti, ternyata Yayasan Kartini Surabaya, akta-aktanya telah didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dan mempunyai ijin operasional dari Kementrian Sosial sehingga telah diakui sebagai badan Hukum. Mengingat kerangan saksi RUHIJATI dan TRI KARDIANA yang keduanya pengurus Yayasan Kartini Surabaya.

Uraian-uraian pertimbangan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 dari orang tua bernama BAMBANG M. dan MARKAI yang telah diserahkan ke Yayasan Kartini Surabaya karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dan sampai dengan sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Yayasan Kartini Surabaya

(dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon). Selanjutnya Pasal 57 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ” dalam hal anak terlantar karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.” Oleh karena anak tersebut telah diserahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Yayasan Kartini Surabaya dikarenakan keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa kedua orang tua anak tersebut sudah tidak menghendaki untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sehingga jika dikaitkan dengan pengertian anak terlantar diatas, hal tersebut menjadikan anak yang bersangkutan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun social. Permohonan Pemohon untuk menyatakan RIZKY DEWANTORO sebagai anak terlantar dapat dikabulkan.

Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 57 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai permohonan Pemohon yang memohon agar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Mu'min (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai yang mengasuh anak terlantar yang bersangkutan dengan sendirinya dapat dikabulkan, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 55, 56, 57 dan 58 Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan.

Berikut ini Peneliti akan menjelaskan mengenai kesinambungan antara unsur-unsur anak terlantar dan anak ditelantarkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby. Kesinambungan akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Anak Ditelantarkan dalam Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby.

Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Anak ditelantarkan	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2015/PN.Sby.
Manusia yang belum dewasa	Lahir tanggal 6 Mei 1998 (17 tahun)
Tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus	Ibu kandung anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut, ditinggal di RSUD Dr Soetomo Surabaya maka dengan surat Penyerahan anak tertanggal/Tahun 1998
Tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social	Ibu kandung anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut Ibu kandung dari anak tersebut belum pernah datang untuk menjenguk
Sengaja dan/atau lalai	Ibu kandung anak tersebut sengaja menelantarkan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan ibu kandung yang meninggalkan anak tersebut di RSUD Dr Soetomo Surabaya

Kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya	Ibu kandung anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut
--	---

Sumber Data : Bahan Hukum Priemer (Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby.), Diolah, 2018.

Berdasarkan uraian yang telah Peneliti jelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan pengangkatan anak dari Yayasan Kartini Surabaya terhadap Rizky Dewantaoro khususnya dalam hal anak terlantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby. sudah sesuai dengan pengertian frasa anak terlantar atau anak ditelantarkan sesuai dengan penjelasan yang telah Peneliti jabarkan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya semua unsur-unsur anak terlantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby. Tabel tersebut menjelaskan bahwa anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan sengaja ditelantarkan oleh ibu kandungnya dikarenakan ibu kandung dari anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut. Ditambah lagi sampai sekarang ibu kandung masih belum menjenguk anak tersebut.

2. Analisis Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.

a. Para Pihak

MOHAMAD IKSAN, Lahir di Lumajang, tanggal lahir 11 Mei 1973,

Agama Islam, Pekerjaan Swasta dan ALVIN VIKI SUWARNI, Lahir di

Mojokerto, tanggal lahir 13 maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Keduanya bertempat tinggal di Dusun Karangasem RT.04 RW.02, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Para pemohon adalah suami-isteri syah (Sebagaimana Kutipan Akta Nikah terlampir). Dalam perkawinan para pemohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anakpun. Para Pemohon telah sepakat untuk mengadopsi/mengangkat anak. Berdasarkan Surat pernyataan serah terima anak terlampir para pemohon telah menerima penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo. Seorang anak perempuan bernama : SITI AISYAH di lahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010.

Anak yang bernama SITI AISYAH tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak tanggal 30 Juli 2010, setelah mendapat penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana anak kandung sendiri. Demi masa depan anak angkat para pemohon tersebut, maka para pemohon memerlukan penetapan/pengesahan anak angkat para pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri setempat.

Pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, para pemohon datang menghadap sendiri-sendiri ke ruang persidangan. Para Pemohon

beralamat di Dusun Karangasem RT.04 RW.02, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dan Para Pemohon memilih untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memeriksa dan memutusnya.

Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dimana permohonan pengangkatan anak tersebut telah berdasarkan hukum, setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengangkatan anak pada tanggal 30 Juli 2010 yang dilakukan oleh suami-istri MOHAMAD IKSAN dan ALVIN VIKA SUWARNI terhadap seorang anak perempuan bernama SITI AISYAH dilahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010 penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo. Berdasarkan fakta para pemohon berusia sudah lebih dari 37 tahun dan para pemohon sampai sekarang belum memiliki seorang anak dan para pemohon belum pernah dihukum serta para pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Telah ternyata anak bernama SITI AISYAH semenjak diangkat anak Para Pemohon telah berada dalam kekuasaan, pemeliharaan dan pendidikan Para Pemohon yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung mereka sendiri dan kebutuhan hidupnya telah terpenuhi dan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para

pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak angkat para pemohon di kemudian hari, para pemohon bermaksud mengesahkan tentang pengangkatan anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena permohonan dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka beralasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran atas nama SITI AISYAH.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan maksud permohonan Para Pemohon tersebut. Oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Berikut ini Peneliti akan menjelaskan mengenai kesinambungan antara unsur-unsur anak terlantar dan anak ditelantarkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan

Negeri Mojokerto Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mkt. Kesenambungan akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3. Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Anak Ditelantarkan dalam Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.

Unsur-Unsur Anak Telantar dan Anak ditelantarkan	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.
Manusia yang belum dewasa	Lahir 18 Januari 2010 (2 tahun)
Tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus	Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo
Tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social	Anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya dan berada berada di bawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo
Sengaja dan/atau lalai	Orang tua sengaja menelantarkan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tersebut terlebih lagi menyerahkan anak tersebut di bawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo
Kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya	Tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kondisi keluarga dari anak tersebut baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya

Sumber Data : Bahan Hukum Primer (Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.), Diolah, 2018.

Berdasarkan uraian yang telah Peneliti jelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan

pengangkatan anak dari Mohamad Iksan dan Alvin Vika Suwarni terhadap Siti Aisyah khususnya dalam hal anak telantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mkt. masih belum sesuai dengan pengertian frasa anak telantar atau anak ditelantarkan sesuai dengan penjelasan yang telah Peneliti jabarkan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya semua unsur-unsur anak telantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mkt, unsur-unsur yang masih belum terpenuhi tersebut adalah unsur tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus dan kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, dalam kasus ini Siti Aisyah tidak berada di bawah asuhan/pemeliharaan dari orang tua kandungnya akan tetapi Siti Aisyah berada dibawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, sehingga menurut Peneliti Siti Aisyah tidak dapat dikatakan tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa keluarga Siti Aisyah telah dengan sengaja tidak memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tersebut terlebih lagi menyerahkan anak tersebut di bawah pemeliharaan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, namun dalam putusan tersebut

tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kondisi keluarga dari anak tersebut baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikis dari keluarga Siti Aisyah.

Melihat tidak terpenuhinya unsur-unsur anak telantar dan ditelantarkan tersebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mkt. yaitu unsur tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus dan kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya, maka Peneliti dalam hal ini tidak setuju terhadap penetapan Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak dari Mohamad Iksan dan Alvin Vika Suwarni terhadap Siti Aisyah.

3. Analisis Penetapan Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL

a. Para Pihak

PEMOHON ASLI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I dan PEMOHON ASLI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon II.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo, Kabup Para Pemohon dilingkungan masyarakat dan didepan Hukum mempunyai

kelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani serta pekerja keras, sehingga secara ekonomi mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Para Pemohon sejak perkawinan hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama ANAK, lahir di Sidoarjo tanggal 30 November 2011, anak dari pasangan AYAH ANAK dan IBU ANAK, alamat Kabupaten Sidoarjo, dimana ANAK tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak berumur 3 (tiga) hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 (sebelas) bulan dan penyerahan anak disampaikan secara lisan oleh AYAH ANAK dan IBU ANAK. Sejak penyerahan anak tersebut, para Pemohon merasa semakin sayang hingga lubuk hati yang paling dalam dan dengan tulus ikhlas para Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mengasuh serta memberikan pendidikan yang baik dan layak, sebagaimana seperti anak sendiri sampai dengan dewasa demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut.

Para Pemohon sangat mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap sangat perlu diterbitkan penetapan tentang syahnya Adopsi anak tersebut oleh para Pemohon. Maksud dan

tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum para Pemohon kini mengangkat anak yang bernama ANAK, dan penetapan pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam, berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

AYAH ANAK dan IBU ANAK sebagai orang tua kandung ANAK telah didengar keterangannya di dalam persidangan yang pada intinya menyetujui dan rela anak ke empat diadopsi oleh para Pemohon. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, saksi mana menerangkan di dalam persidangan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dianggap dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim menganggap kehendak Pemohon untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat jika permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Islam, lagi pula

tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, maka pemohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan.

Berikut ini Peneliti akan menjelaskan mengenai kesinambungan antara unsur-unsur anak telantar dan anak ditelantarkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL. Kesinambungan akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4. Unsur-Unsur Anak Terlantar dan Anak Ditelantarkan dalam Penetapan Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL.

Unsur-Unsur Anak Telantar dan Anak ditelantarkan	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL.
Manusia yang belum dewasa	Lahir 30 November 2011 (11 bulan)
Tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus	Anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak berumur 3 (tiga) hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 (sebelas) bulan
Tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social	Anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya dan diasuh oleh para Pemohon sejak berumur 3 (tiga) hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 (sebelas) bulan
Kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya	Tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kondisi keluarga dari anak tersebut baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya
Sengaja dan/atau lalai	Tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kesengajaan atau kelalaian dari orang tua sehingga menyebabkan anak menjadi ditelantarkan

Orang tuanya melalaikan tanggung jawab terhadap anak	Tidak memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tersebut terlebih lagi menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh para Pemohon sejak berumur 3 (tiga) hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 (sebelas) bulan yang disampaikan secara lisan oleh AYAH ANAK dan IBU ANAK
--	---

Sumber Data : Bahan Hukum Primer (Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt.), Diolah, 2018.

Berdasarkan uraian yang telah Peneliti jelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan pengangkatan anak dari para Pemohon terhadap ANAK khususnya dalam hal anak telantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL. masih belum sesuai dengan pengertian frasa anak telantar atau anak ditelantarkan sesuai dengan penjelasan yang telah Peneliti jabarkan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya semua unsur-unsur anak terlantar dan anak ditelantarkan dalam Penetapan Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL. unsur-unsur yang masih belum terpenuhi tersebut adalah unsur tidak terpelihara, tidak terawat, kesengajaan dan/atau kelalaian orang tua, dan/atau tidak terurus anak dan kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

Anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak berumur 3 (tiga) hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 (sebelas) bulan, dalam kasus ini ANAK

tidak berada dibawah asuhan/pemeliharaan dari orang tua kandungnya akan tetapi ANAK berada dibawah asuhan para Pemohon, sehingga menurut Peneliti ANAK tidak dapat dikatakan tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus. Tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kesengajaan atau kelalaian dari orang tua sehingga menyebabkan anak menjadi ditelantarkan. Selanjutnya, tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kondisi keluarga dari anak tersebut (dalam hal ini AYAH ANAK dan IBU ANAK) baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikis dari keluarga ANAK, sehingga tidak dapat dikatakan ANAK membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

Melihat tidak terpenuhinya unsur-unsur anak telantar dan ditelantarkan tersebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL. yaitu unsur tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus dan kondisi keluarga baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya, maka Peneliti dalam hal ini tidak setuju terhadap penetapan Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak dari para Pemohon terhadap ANAK.

Berdasarkan ketiga penetapan tersebut, dapat kita lihat bahwa selain mempertimbangkan syarat pengangkatan anak khususnya anak terlantar atau anak ditelantarkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tua kandung dan orang tua angkat dalam memelihara dan mengasuh anak

untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Penetapan Nomor: 538/Pdt.P/2015/PN.Sby Majelis Hakim menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa ibu kandung tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut. Sedangkan untuk mampu atau tidaknya orang tua angkat tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim. Berikutnya dalam Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt tidak dijelaskan tentang kondisi keluarga kandung anak sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tua kandung dari anak, sedangkan untuk orang tua angkat Majelis Hakim menjelaskan bahwa pemeliharaan dan pendidikan Para Pemohon yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung dan kebutuhan hidupnya telah terpenuhi dan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga orang tua angkat dianggap layak untuk melakukan pengangkatan anak. Yang terakhir adalah Nomor: 0461/Pdt.P/2012/PA.BL, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan tentang mampu atau tidaknya orang tua kandung untuk memelihara atau mengasuh anak tersebut, tetapi Majelis Hakim menjelaskan bahwa orang tua angkat mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, hal itu dibuktikan dengan Pertimbangan Hakim yang menjelaskan bahwa “Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani serta pekerja keras, sehingga secara ekonomi mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga” dan “Para Pemohon sangat mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap sangat

perlu diterbitkan penetapan tentang syahnya Adopsi anak tersebut oleh para Pemohon.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah Peneliti uraikan dalam bab yang mengacu pada 3 (tiga) penetapan Majelis Hakim yang berbeda-beda sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa frasa anak terlantar dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak dapat diartikan sebagai manusia yang belum dewasa yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan.

Frasa anak ditelantarkan dapat diartikan sebagai “membuat manusia yang belum dewasa tidak terpelihara, tidak terawat, dan atau tidak terurus, serta tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial disebabkan karena orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak maupun dikarenakan kondisi keluarga yang tidak layak sehingga menyebabkan anak-anak tersebut membutuhkan bantuan pelayanan.” Dalam hal ini yang bertindak sebagai subjek untuk membuat anak terlantar adalah orang tua dan pihak-pihak lain yang sebelumnya telah ditetapkan bertindak sebagai wali dari anak tersebut. Orang tua atau wali yang sah atau orang bertanggung jawab atas

pendidikan, perawatan serta membesarkan (bertanggung jawab) anak tersebut melakukan “kesengajaan” terhadap telantar/penelantaran anak tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam hal tersebut terdapat “itikad tidak baik atau dengan kata lain yaitu itikad buruk dari orang tua walinya.

B. Saran

Peneliti dalam sub-bab ini akan menguraikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh Peneliti terhadap Hakim dan calon orang tua angkat.

1. Bagi Hakim

Agar kedepannya dapat lebih cermat sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi permasalahan dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak, kedepannya dapat lebih cermat dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak khususnya terhadap frasa anak terlantar dan anak ditelantarkan sebagai salah satu syarat anak angkat dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pengangkatan Anak, dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam menentukan apakah suatu kondisi anak termasuk dalam anak terlantar maupun anak ditelantarkan.

2. Bagi Calon Orang Tua Angkat

Untuk calon orang tua angkat agar permohonan pengangkatan anak dapat diterima oleh Hakim, dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak haruslah mengerti mengenai batasan frasa anak terlantar dan

ditelantarkan sehingga permohonan pengangkatan anak tersebut memiliki alasan yang kuat untuk memperoleh persetujuan dari Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali Afandi, Hukum Keluarga, **Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)**, Bina aksara, Jakarta, 1986.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, **Hukum dan Hukum Islam**, CV Sinar sakti, Bandar lampung, 2007.

Anton Moeliono, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Apong Herlina, **Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, UNICEF, Jakarta, 2003.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, PT Mandar Maju, Bandung, 2008.

Fuad Muhammad Fachruddin, **Masalah Anak dalam Hukum Islam**, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.

Gosita Aris, **Masalah Perlindungan Anak**, Sinar grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Ahmad dan Santoso Ananda, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 2006.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat Cetakan I**, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.

Howard Dubowitz, *Handbook for Child Protection Practice*, Penerbit Sage, California, 2000.

J. Satrio, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga**, Sumur, Bandung, Bandung, 2000.

Jalaludin Rahmad, **Islami Alternatif Ceramah-Ceramah Dikampus**, Mizan, Bandung, 1993.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media, 2008.

Kamil A dan Fauzan H.M, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Koesparmono Irsan, **Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.

Lulik Djatikumoro, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muderis Zaini, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Muhammad Budhiarta, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, PT. Melton Putra, Jakarta, 1991.

Muhammad Bushar, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981.

Musthofa Sy, **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

R. Soepomo, **Bab-bab tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Rachmat Trijono, **Kamus Hukum**, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

_____, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Tamakiran, **Asas-asas Hukum Waris**, Puionir Java, Bandung, 1972.

Walter A. Friedlander, **Introduction to Social Welfare**, Prentice Hall, India, 1982.

JURNAL ONLINE / INTERNET :

Bab II Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, *Online*, <http://digilib.uinsby.ac.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Online*, <https://kbbi.web.id>.

Metode Penelitian, *Online*, <http://digilib.unila.ac.id>.

Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Online*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4768.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 2393/UN10.F01.11/PP/2018
Hal : Perpanjangan Pertama Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Program S-1 Ilmu Hukum

Kepada : Sdr. Alwi
NIM. 145010107111032

Menunjuk surat Saudara tertanggal 9 Mei 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat, dan mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka permohonan Saudara dapat disetujui dan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Nomor 19 Tahun 2018 diperpanjang untuk pertama kali *selama 3 bulan*, berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2018.

Selama waktu perpanjangan ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 9 Mei 2018


Ketua Bagian Hukum Perdata
Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM
NIP. 197206222005011002

Tembusan Yth. :

1. Dosen Pembimbing I : Ratih Dheviana Puru, SH.LLM;
2. Dosen Pembimbing II : Fitri Hidayat, SH.MH.;
3. Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Kasubbag Akademik;

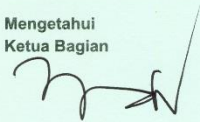
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

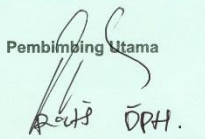
Pembimbing Utama : Ratih Dheviana Peru, SH, LLM, Nama Mahasiswa : ALWI
Pembimbing : LLM, NIM : 145010107111032
Pendamping : Fitri Hidayat, SH, MH, Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA
SK Dekan : No. 19 Tahun 2017, Tgl. 28 Desember 2017 "ANAK TELANTAR" ATAU "ANAK DITELANTAR KAN" SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN ANAK.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	11-5	bab I - II	revisi → BH → pua pengantar	P. H.
2	14-5	outline bab IV	revisi	P. H.
3	28-5	Penulisan Dasar Pertimbangan dan Tabel BAB IV - V	Revisi → Penulisan dasar Pertimbangan Hakim dan Tabel Revisi	P. H.
4	4-6	BAB IV	Revisi	P. H.
5		Perkuat RU hukum		P. H.
6		Acc Bab I - V	Acc	P. H.
7		Acc Jurnal.	Acc	P. H.

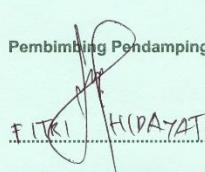
Mengetahui
Ketua Bagian



Pembimbing Utama


Ratih DPH.

Pembimbing Pendamping


FITRI HIDAYAT



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 19 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Ratih Dheviana Puru, SH.ILM;** **Fitri Hidayat, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Alwi NIM 145010107111032**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2017


RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 694/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ALWI
NIM : 145010107111032
Judul : ANALISIS YURIDIS BATASAN FRASA ANAK TELANTAR ATAU ANAK
DITELANTARKAN SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN ANAK
(Studi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Juli 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

**ISSUED
PLAGIASI FH UB**





P E N E T A P A N

Nomor : 538/Pdt.P/2015/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :-----

YAYASAN KARTINI SURABAYA, berkedudukan di Surabaya dan berkantor di jalan

Siak No.2 Surabaya yang dala hal ini diwakili oleh ENDANG TRIKARDININGSIH beralamat di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan X/M-1 Surabaya selaku pimpinan Yayasan tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2015 No. 538/Pdt.P/2015/PN.Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;-

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;-----

TENTANG KEJADIANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2015 terdaftar dibawah Register No. 538/Pdt.P/2015/PN.Sby yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa anak yang dimohonkan dalam perkara penetapan ini adalah seorang anak laki-laki bernama Rizky Dewantaoro yang lahir di Surabaya tanggal 6 Mei 1998 (Bukti

Halaman 1 Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1) diluar nikah dari seorang perempuan indonesia bernama Ibu Markati, beragama Islam, bertempat tinggal di Endroso V/9 Surabaya ;-----
- 2 Bahwa kemudian karena ibu kandung anak tersebut tidak sanggup membiayai, memelihara dan membesarkan anak tersebut, ditinggal di RSUD Dr Soetomo Surabaya maka dengan surat Penyerahan anak tertanggal / Tahun 1998 (Bukti P-2) anak tersebut oleh RSUD Dr. Soetomo diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Kartini Surabaya dengan melepaskan segala hak dan kewajiban atas anak tersebut ; -----
- 3 Bahwa, dalam Surat penyerahan Anak Bukti P-2 tersebut RSUD Dr. Soetomo memberi kuasa penuh kepada Yayasan Kartini Surabaya untuk mencari orang tua angkat bagi anak tersebut dan melakukan semua tindakan yang perlu tanpa kecuali bagi pengangkatan anak tersebut ; -----
- 4 Bahwa ternyata sampai sekarang anak tersebut belum memperoleh calon orang tua angkat yang bermaksud mengambil anak tersebut, dan sebagaimana persyaratan adopsi sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Thn 2009 bahwa anak harus memiliki Akte Kelahiran ; -----
- 5 Bahwa, sebagai salah satu persyaratan untuk dapatnya anak menempuh pendidikan formal di Sekolah umum bagi anak tersebut diperlukan adanya akte kelahiran, padahal anak tersebut belum pernah memiliki akte kelahiran ; -----
- 6 Bahwa untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, namun mendapat penolakan karena anak tersebut tidak memiliki kelengkapan identitas kependudukan orang tuanya (Bukti P-3) ; -----
- 7 Bahwa sebagai jalan keluar untuk pengurusan memperoleh akte lahir bagi anak tersebut pihak kantor catatan Sipil menyarankan pemohon agar ke pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk mohon agar anak tersebut terlebih dahulu ditetapkan sebagai anak terlantar (Periksa Butir 4 pada bukti P-3) ; -----

8 Bahwa dalam pada itu untuk menjadi bahan pertimbangan pengadilan bahwa sejak itu diserahkan kepada Yayasan kartini Surabaya, ibu kandung anak tersebut belum pernah datang menjenguk ; -----

9 Bahwa pendaftaran bagi anak terlantar dapat diterima dan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan pasal 57 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Dalam hak anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagaimana anak terlantar ; -----

Maka demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya aaagar dalam keputusannya berkenan menetapkan

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan seorang anak laki-laki bernama “ RIZKY DEWANTORO “ yang lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 sebagai anak yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan Indonesia bernama “MARKATI” sebagai anak terlantar ;-----
- 3 Menetapkan Yayasan Kartini Surabaya sebagai tempat penampungan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; -----
- 4 Menetapkan biaya perkara ini Atau ; -----

Mohon putusan/Penetapan yang Patut, Bak dan Adil ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :-----

- 1 Fotocopy Kutipan surat Kelahiran dari RSUD Dr Soetomo Surabaya , bukti P-1;-----
- 2 Fotocopy Akte Notaris/PPAT WIDIO RAHARDJO, SH Nomer 1 tanggal 02 Juni 2008 tentang berita Acara Rapat Yayasan Kartini Surabaya , bukti P-2;-----
- 3 Fotocopy surat dari Men.Kum.Ham tanggal 04 Juni 2012 Nomer; A HU2.AH.01.04-2956 tentang permohonan yayasan Kartini Surabaya yang ditujukan kepada Notaris Widio Rahardjo, bukti P-3 ;

- 4 Fotocopy surat penyerahan dari RSUD Dr, Soetomo Surabaya , bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dibubuhi materai cukup serta setelah dicocokkan dengan aslinya semuanya, sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Saksi RUHIJATI :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Ketua Yayasan Kartini Surabaya sedangkan saksi sebagai bendahara dari yayasan tersebut ;-----
 - Bahwa Pemohon memegang Yayasan Kartini Surabaya sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Kartini Surabaya pada tahun 1998 pernah menerima penyerahan anak yang bernama RIZKY DEWANTORO dari RSUD Dr Soetomo Surabaya ;

- Bahwa anak tersebut diserahkan sejak berumur 2 bulan ;
- Bahwa anak tersebut tidak diketahui nama bapak dan ibunya ;
- Bahwa di Yayasan Kartini Surabaya jumlah anak yang diasuh 12 anak ;
- Bahwa anak tersebut ditinggal begitu saja oleh ibunya karena tidak mempunyai biaya ;

- Bahwa anak tersebut sekarang Sekolah di SMP luar biasa ;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran dari anak tersebut ;

2 Saksi TRI KARDIANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Ketua Yayasan Kartini Surabaya sedangkan saksi sebagai Sekretaris dari yayasan tersebut ;
- Bahwa Pemohon memegang Yayasan Kartini Surabaya sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Yayasan Kartini Surabaya pada tahun 1998 pernah menerima penyerahan anak yang bernama RIZKY DEWANTORO dari RSUD Dr Soetomo Surabaya ;

- Bahwa anak tersebut diserahkan sejak berumur 2 bulan ;
- Bahwa anak tersebut tidak diketahui nama bapak dan ibunya ;
- Bahwa di Yayasan Kartini Surabaya jumlah anak yang diasuh 12 anak ;
- Bahwa anak tersebut ditinggal begitu saja oleh ibunya karena tidak mempunyai biaya ;

- Bahwa anak tersebut sekarang Sekolah di SMP luar biasa ;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran dari anak tersebut ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan permohonan agar seorang anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO , yang telah diserahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Yayasan Kartini Surabaya karena kedua orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar dan menunjuk Yayasan Kartini yang berkedudukan di Surabaya sebagai pihak yang berwenang untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUHIJATI dan TRI KARDIANA ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RUHIJATI dan TRI KARDIANA, dan surat bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Akte Notaris/PPAT WIDIO RAHARDJO, SH tertanggal 02 Juni 2008 Nomer : 1 bahwa Pemohon adalah Ketua Yayasan Kartini yang berkedudukan di Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ; -----



Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diberi tanda P-1 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 dari orang tua bernama BAMBANG M dan MARKAI dan kemudian telah diserahkan ke Yayasan Kartini di Surabaya karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi tanda P-3, ternyata Yayasan Kartini Surabaya, akta-aktanya telah didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dan mempunyai ijin operasional dari Kementerian Sosial sehingga telah diakui sebagai badan Hukum yang berhak ; -----

1. Menyatuni dan mengasuh anak yatim piatu ; -----
2. Melaksanakan panti asuhan anak yatim piatu ; -----
3. Penyantunan anak yatim dan piatu ; -----
4. Meningkatkan usaha kemampuan fakir miskin ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RUHIJATI dan TRI KARDIANA yang keduanya sebagai pengurus dari Yayasan Kartini Surabaya tela ternyata pula ;

- Bahwa Yayasan Kartini Surabaya bersedia dan mampu untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut ; -----
- Bahwa Yayasan Kartini Surabaya telah mendapat ijin operasional dari Dinas Sosial ; -----
- Bahwa Yayasan Kartini Surabaya saat ini menampung 12 orang anak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar anak laki-laki yang bernama RIZKY DEWANTORO lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 dari orang tua bernama BAMBANG M. dan MARKAI yang telah diserahkan ke Yayasan Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dan sampai dengan sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Yayasan Kartini Surabaya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan (angka 1) ;
- Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (angka 6) ;
- Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (angka 10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 57 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ” dalam hal anak terlantar karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah diserahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Yayasan Kartini Surabaya dikarenakan keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini sehingga tidak memiliki dokumen kelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa kedua orang tua anak tersebut sudah tidak menghendaki untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sehingga jika dikaitkan dengan pengertian anak terlantar diatas, **hal tersebut menjadikan anak yang bersangkutan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menyatakan RIZKY DEWANTORO sebagai anak terlantar dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 57 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai permohonan Pemohon yang memohon agar Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Mu'min (Pemohon) dapat ditetapkan sebagai yang mengasuh anak terlantar yang bersangkutan dengan sendirinya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 55, 56, 57 dan 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan seorang anak laki-laki bernama " **RIZKY DEWANTORO** ", yang lahir di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 , sebagai anak yang lahir dari pasangan suami isteri **BAMBANG M** dan **MARKAI** sebagai " **Anak Terlantar** " ; -----
- 3 Menetapkan Yayasan KARTINI SURABAYA yang berkedudukan di Surabaya sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; -----
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 13 **JULI** 2015 oleh kami **ARI JIWANTARA, S.H, M.Hum** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 9 dari 7 Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYUK WIYANATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon,-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YAYUK WIYANATI, S.H,

ARI JIWANTARA, SH. MHum



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 04/ Pdt.P / 2012 / PN.Mkt.

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** -----

----- Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas nama para Pemohon ; -----

1. **MOHAMAD IKSAN**, Lahir di Lumajang, tanggal lahir 11 Mei 1973, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta ; -----

2. **ALVIN VIKA SUWARNI**, Lahir di Mojokerto, tanggal lahir 13 maret 1975, Agama

Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Karangasem RT.04 RW.02, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai para pemohon ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

----- Telah meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :** -----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 Januari 2012 atas register No. 04 / Pdt.P / 2012 / PN.Mkt. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

* Bahwa, para pemohon adalah suami-isteri syah (Sebagaimana Kutipan Akta Nikah terlampir) ; -----

* Bahwa, dalam perkawinan para pemohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anakpun ; -----

* Bahwa, Para Pemohon telah sepakat untuk mengadopsi/mengangkat anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa, berdasarkan Surat pernyataan serah terima anak terlampir para pemohon telah menerima penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo. Seorang anak perempuan bernama : SITI AISYAH di lahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010 ; -----
 - * Bahwa, anak yang bernama SIRI AISYAH tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak tanggal 30 Juli 2010 ; -----
 - * Bahwa, setelah mendapat penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana anak kandung sendiri ; -----
 - * Bahwa, demi masa depan anak angkat para pemohon tersebut, maka para pemohon memerlukan penetapan/pengesahan anak angkat para pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri setempat ; -----
- Berdasarkan hal hal terurai di atas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----
- “ Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

- “ Menyatakan, pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon : 1. MOHAMAD IKSAN dan 2. ALVIN VIKA SUWARNI beralamat di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Karangasem Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terhadap seorang anak perempuan bernama SITI AISYAH lahir di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010, syah menurut hukum ; -----
- “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon (MOHAMAD IKSAN dan ALVIN VIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNI) tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran atas nama SITI AISYAH
(anak angkat para pemohon) ; -----

“ Menentukan biaya dalam permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut para Pemohon
telah mengajukan bukti surat yaitu : -----

P-1 : Fotocopy KartuTanda Penduduk (KTP) atas nama MOHAMAD IKSAN dan atas
nama ALVIN VIKA SUWARNI ; -----

P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MOHAMAD IKSAN.

P-3: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/06/II/2000 tertanggal 4-2-2000 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten
Mojokerto atas nama MOHAMAD IKSAN dengan ALVIN VIKA SUWARNI ;-

P-4 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Bayi dari Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor :
460/623/436.6.15.1/2010 tertanggal 19 Januari 2010 ; -----

P-5: Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak Nomor : 460/021/102.009/2010 tertanggal
20 Januari 2010 dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Playanan Sosial Asuhan
Balita Sidoarjo ; -----

P-6: Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi jawa Timur tentang pemberian
ijin pengangkatan anak Warga Negara Indonesia Nomor : 460/330/
SK/102.005/2011tertanggal 15 Agustus 2011 dari Dinas Sosial Provinsi jawa
Timur ; -----

P-7: Fotocopy Berita Acara Serah terima Calon Anak Angkat (CAA) Nomor :
460/212/102.09/2010 yang menerangkan bahwa Dra. Amelia Rozanty Jabatan
Kepala UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah menyerahkan seorang
bayi bernama SITI AISYAH kepada MUHAMMAD IKSAN, SE dan ALVIN VIKA
SUWARNI ; -----

P-8: Fotocopy Surat perihal Konfirmasi Akta Kelahiran atas nama Siti Aisyah tertanggal
15 Desember 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Mojokerto kepada Mohamad Iksan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P-9 : Surat Pernyataan tertanggal 05 Januari 2012 yang dibuat oleh Mohamad Iksan dan

Alvin Vika Suwarni yang menyatakan bahwa mereka mengangkat anak bernama

SITI AISYAH demi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut ; -----

- Bahwa bukti surat yang berupa fotocopy tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali P-9 surat aslinya dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu : -----

1. Saksi. SUTARNO : di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

* Bahwa, saksi kenal dengan Para pemohon karena masih ada hubungan keluarga ; ----

* Bahwa, para pemohon adalah suami-isteri yang dalam perkawinannya selama 12 tahun tidak dikaruniai seorang anak untuk itu para pemohon sepakat untuk mengangkat anak ; -----

* Bahwa, para pemohon telah menerima penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo, seorang anak perempuan bernama : SITI AISYAH di lahirkan di Surabaya pada tahun 2010 ; -----

* Bahwa, anak yang bernama SITI AISYAH tersebut telah diserahkan kepada para pemohon sejak umur 6 bulan dan para pemohon mengangkat anak kehidupannya mampu secara ekonomi dan berkecukupan ; -----

* Bahwa, setelah mendapat penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/ merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana anak kandung sendiri ; -----

* Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon di kemudian hari, Para pemohon bermaksud untuk mengesahkan tentang pengangkatan anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa para pemohon mengangkat anak bernama SITI AISYAH tersebut saudara
saudara para pemohon tidak keberatan ; -----

----- Atas Keterangan saksi tersebut , Para Pemohon membenarkannya ; -----

2. Saksi. JULAIKAH : di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut: -----

* Bahwa, benar saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan keluarga.

* Bahwa, para pemohon adalah suami-isteri yang dalam perkawinannya selama 12
tahun tidak dikaruniai seorang anak untuk itu para pemohon sepakat untuk
mengangkat anak ; -----

* Bahwa, para pemohon telah menerima penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl.
W. Monginsiti No.25 Sidoarjo, seorang anak perempuan bernama : SITI AISYAH di
lahirkan di Surabaya pada tahun 2010 ; -----

* Bahwa, anak yang bernama SITI AISYAH tersebut telah diserahkan kepada para
pemohon sejak umur 6 bulan dan para pemohon mengangkat anak kehidupannya
mampu secara ekonomi dan sosial serta berkecukupan ; -----

* Bahwa, setelah mendapat penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/
merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana
anak kandung sendiri ; -----

* Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon dan anak angkat Para Pemohon di
kemudian hari, Para pemohon bermaksud untuk mengesahkan tentang pengangkatan
anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto ;

* Bahwa para pemohon mengangkat anak bernama SITI AISYAH tersebut saudara
saudara para pemohon tidak keberatan ; -----

----- Atas Keterangan saksi tersebut , Para Pemohon membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga memberikan
keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri dalam perkawinannya selama 12 tahun tidak dikaruniai seorang anak untuk itu para pemohon sepakat untuk mengangkat anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo, seorang anak perempuan bernama : SITI AISYAH di lahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010 para pemohon mampu secara sosial dan ekonomi mengasuh anak yang bernama SITI AISYAH serta menyatakan bahwa tujuan dari para pemohon mengangkat anak tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan juga demi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut nantinya atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, para pemohon datang menghadap sendiri-sendiri ke ruang persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Karangasem RT.04 RW.02, Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dan Para Pemohon memilih untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memeriksa dan memutusnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dimana permohonan tersebut telah berdasarkan hukum yaitu : -----

a. SEMA No.2/1979 jo SEMA No.6/1983 jo SEMA No.4/1989 jo SEMA No.2/2009 ; ---

b. PPRI No.54/1997 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ; -----

c. Pasal 39 UU RI No. 23/2002 tentang perlindungan anak ; -----

Sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengangkatan anak pada tanggal 30 Juli 2010 yang dilakukan oleh suami-istri **MOHAMAD IKSAN** dan **ALVIN VIKA SUWARNI** terhadap seorang anak perempuan bernama **SITI AISYAH** di lahirkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010 penyerahan anak secara resmi dari Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan balita Sidoarjo, yang beralamat di Jl. W. Monginsiti No.25 Sidoarjo ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para pemohon berusia sudah lebih dari 37 tahun dan para pemohon sampai sekarang belum memiliki seorang anak dan para pemohon belum pernah dihukum serta para pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata pula anak bernama **SITI AISYAH** semenjak diangkat anak Para Pemohon telah berada dalam kekuasaan, pemeliharaan dan pendidikan Para Pemohon yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung mereka sendiri dan kebutuhan hidupnya telah terpenuhi dan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak angkat para pemohon di kemudian hari, para pemohon bermaksud untuk mengesahkan tentang pengangkatan anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka beralasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran atas nama SITI AISYAH ; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan maksud permohonan Para Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang , bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat akan hukum adat dan ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menyatakan, pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon : 1. MOHAMAD IKSAN dan 2. ALVIN VIKI SUWARNI beralamat di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Karangasem Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terhadap seorang anak perempuan bernama SITI AISYAH lahir di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2010, syah menurut hukum ; -----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon (MOHAMAD IKSAN dan ALVIN VIKI SUWARNI) tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran atas nama SITI AISYAH (anak angkat para pemohon) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -
----- Demikian diambil penetapan ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **17 JANUARI 2012** oleh kami : **HARI WIDYA PRAMONO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor : 04 / Pent.K /Pdt.P /2012 / PN.Mkt tanggal 11 Januari 2012 dengan dibantu oleh : **HERMINADI BUDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dihadiri Para Pemohon tersebut ; -----

Panitera pengganti

H a k i m,

HERMINADI BUDI, SH.

HARI WIDYA PRAMONO, SH.MH

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Leges Rp. 5.000,-
- ATK. Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Sumpah Rp. 10.000,-
- Ongkos panggil Rp. 90.000,-
- J u m l a h Rp. 196.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Dicatat disini, bahwa pada tanggal **17 Januari 2012**, penetapan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. -----

Pengadilan Negeri Mojokerto,
Panitera/Sekretaris,

DYAH SUSMARDIANI, SH.MH.
NIP. 19571224 198001 2002.

----- Salinan yang sama bunyinya dikeluarkan atas permintaan para pemohon pada tanggal **26 JANUARI 2012** ;

Pengadilan Negeri Mojokerto,
Panitera/Sekretaris,

DYAH SUSMARDIANI, SH.MH.
NIP. 19571224 198001 2002.

Biaya –biaya :

- Materai turunan penetapan Rp. 6.000,-
- Leges turunan penetapan Rp. 5.000,-
- Turunan penetapan Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 14.000,-

Untuk Dinas, salinan yang sama bunyinya dikirim ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk dipergunakan seperlunya ; -----

Pengadilan Negeri Mojokerto,
Panitera/Sekretaris,



DYAH SUSMARDIANI, SH.MH.
NIP. 19571224 198001 2002.

----- Untuk Kas Negeri Kaca : I / N / 2012.-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0461/Pdt.P/2012/PA.BL

ÈÓÛã Çááã ÇáÑÍãä ÇáÑÍãä

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON ASLI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA.BL mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, ;-
- Bahwa Para Pemohon di lingkungan masyarakat dan di depan Hukum mempunyai kelekuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2097/VII/2012/POLRES dan SKCK/YANMAS/2098/VII/2012/POLRES ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani serta pekerja keras, sehingga secara ekonomi mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi kebutuhan keluarga ;

- Bahwa Para Pemohon sejak perkawinan hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama ANAK, lahir di Sidoarjo tanggal 30-11-2011, anak dari pasangan AYAH ANAK dan IBU ANAK, alamat Kabupaten Sidoarjo ; ---
- Bahwa anak bernama ANAK tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak 3 hari setelah lahir hingga sekarang berumur 11 bulan dan penyerahan anak disampaikan secara lisan oleh AYAH ANAK dan IBU ANAK ; -----
- Bahwa sejak penyerahan anak tersebut, para Pemohon merasa semakin sayang hingga lubuk hati yang paling dalam dan dengan tulus ikhlas para Pemohon sanggup untuk membesarkan dan mengasuh serta memberikan pendidikan yang baik dan layak, sebagaimana seperti anak sendiri sampai dengan dewasa demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut ;
- Bahwa para Pemohon sangat mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 PP 54 tahun 2007;
- Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap sangat perlu diterbitkan penetapan tentang syahnya Adopsi anak tersebut oleh para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan dalil dalil tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan syah Adopsi yang dilakukan oleh Para Pemohon (PEMOHON ASLI 1 dan PEMOHON ASLI 2) terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Sidoarjo tanggal 30-11-2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
4. Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Hakim Ketua dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung ANAK, hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, mereka menyatakan rela dan menyetujui anak kandungnya yang ke 4 tersebut diadopsi oleh para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/V/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy KTP Nomor : 350514 070675 0003 tanggal 19 Maret 2009 Atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy KTP Nomor : 350514 610578 0002 tanggal 19 Maret 2009 Atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor : 043 tanggal 04 Juli 2012 atas nama Pemohon I yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor : 044 tanggal 04 Juli 2012 atas nama Pemohon II yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2097/VII/2012/POLSEK tanggal 03 Juli 2012 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2098/VII/2012/POLSEK tanggal 03 Juli 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7) ; -----
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-30082012-0129 tanggal 30 Nopember 2011 telah lahir ANAK yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8) ; -----
9. Fotocopy KTP Nomor : 3515130501700004 tanggal 04 Maret 2010 dan 3515130601700004 tanggal 04 Maret 2010 Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua kandung dan orang tua angkat dan diketahui oleh Kepala Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10) ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/36/III/1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11) ; -----

Menimbang bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
 - Saksi tahu para Pemohon mau mengadopsi anak yang bernama ANAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon dengan suka rela tanpa ada paksaan dari manapun juga;
- Pemeliharaan anak oleh Pemohon disebabkan hingga kini para Pemohon belum mempunyai anak, juga disebabkan para Pemohon ingin membantu sesama dengan memelihara anak tersebut layaknya anak sendiri;
- Dengan keadaan Pemohon saat ini dianggap mampu memelihara anak tersebut dengan baik hingga dewasa sehingga masa depan anak tersebut diharapkan lebih terjamin dari pada ikut orang tua kandungnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kabupaten Blitar ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Saksi tahu para Pemohon mau mengadopsi anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa penyerahan anak oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon dengan suka rela tanpa ada paksaan dari manapun juga;
- Pemeliharaan anak oleh Pemohon disebabkan hingga kini para Pemohon belum mempunyai anak, juga disebabkan para Pemohon ingin membantu sesama dengan memelihara anak tersebut layaknya anak sendiri;
- Dengan keadaan Pemohon saat ini dianggap mampu memelihara anak tersebut dengan baik hingga dewasa sehingga masa depan anak tersebut diharapkan lebih terjamin dari pada ikut orang tua kandungnya;
-

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini hal hal yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum para Pemohon kini mengangkat anak yang bernama ANAK, dan penetapan pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam;

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

----- Menimbang bahwa Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya disebutkan:

"Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain :

angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan ***penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam***;

Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal mana Pemohon telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut dan ketentuan tersebut juga termuat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, AYAH ANAK dan IBU ANAK sebagai orang tua kandung ANAK telah didengar keterangannya di dalam persidangan yang pada pokoknya menyetujui dan rela anak ke empat di adopsi oleh para Pemohon ;

----- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bukti baik tertulis maupun saksi saksi, saksi mana menerangkan di dalam persidangan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi saksi dapat diterima dan dianggap dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik keterangan Pemohon, istri Pemohon, dan bukti bukti, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut agama Islam dan hingga kini tetap memeluk agama Islam;
- Para Pemohon tersebut telah sepakat mengangkat seorang anak bernama;
- Orang tua kandung dari anak tersebut bernama AYAH ANAK dan IBU ANAK telah menyetujui tentang pengangkatan anak oleh Para Pemohon;
- Keadaan ekonomi Pemohon kini dianggap cukup mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari hari hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Pemohon menyatakan dengan tulus ikhlas memelihara anak tersebut demi membantu masa depan anak itu sendiri dan akan dipelihara, diasuh menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dipeluk oleh Pemohon;

----- Menimbang bahwa kepada Pemohon dan istrinya telah diberitahukan prinsip prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan mereka menyatakan setuju prinsip prinsip sebagai berikut :

- Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak yang terlantar;
- Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

"Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang orang yang ada dibawah pemeliharaanmu";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa kehendak Pemohon untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

ia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya" ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat jika permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak dalam perkara a quo telah memenuhi prinsip prinsip Hukum Islam, lagi pula tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON ASLI 1) dan Pemohon II (PEMOHON ASLI 2) tersebut ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 30 Nopember 2011 anak kandung dari AYAH ANAK dan IBU ANAK, sebagai anak angkat sah dari Pemohon I (PEMOHON ASLI 1) dan Pemohon II (PEMOHON ASLI 2);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I (PEMOHON ASLI 1) dan Pemohon II (PEMOHON ASLI 2) membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Blitar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1433H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang terdiri dari Drs.MOCH. ANWAR MUSADAD,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.TONTOWI, SH, MH serta Drs. MURDINI masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHALLI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. TONTOWI, SH, MH
Hakim Anggota II

Hakim Ketua

Ttd

Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD,MH

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MURDINI

Panitera Pengganti,

Ttd

H. MAHALLI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran dan redaksi	: Rp. 35.000,-	Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-	Oleh
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-	Panitera Pengadilan Agama Blitar
2. Materai	: Rp. 6.000,-	

Jumlah	: Rp. 241.000,-	

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. SYATIBI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)